

Stimulus, Kebijakan yang Harus Mulus

Oleh

Mudrajad Kuncoro

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Chief Editor PT Recapital Advisors.<http://www.mudrajad.com>.

Sumber: *Investor Daily*, 10 Maret 2009

http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72371

Paket stimulus fiskal yang diajukan pemerintah akhirnya disetujui oleh DPR sebesar Rp 73,3 triliun. Mampukah paket senilai 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini mengerem laju pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan mencapai 1 juta orang? Mampukah paket stimulus itu menggerakkan sektor riil di tengah kelesuan pasar, menciptakan kesempatan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi RI pada 2009?

Dari sudut kacamata ekonomi publik, fungsi anggaran setidaknya mencakup aspek alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Banyak yang mempertanyakan mengapa alokasi paket stimulus fiskal ini didominasi oleh *tax saving*, penghematan pajak. Memang Rp 56,3 triliun atau hampir 80% dari paket ini dialokasikan untuk stimulus perpajakan dan kepastian. Sisanya, atau hanya Rp 17 triliun saja, yang benar-benar digunakan untuk belanja langsung (*direct spending*) sektor infrastruktur Rp 12,2 triliun dan Rp 4,8 triliun untuk subsidi langsung dan energi.

Seberapa besar paket stimulus Indonesia dibanding negara lain? Amerika Serikat (AS) mengeluarkan paket stimulus sebesar US\$ 787 miliar, Jerman sebesar US\$ 70 juta, Jepang sebesar US\$ 990,9 miliar, Malaysia senilai US\$ 2 miliar, Korea Selatan US\$ 4,1 miliar, dan Thailand US\$ 8,6 miliar. AS berbeda dalam komposisi antara stimulus pengeluaran dengan perpajakannya. AS memberikan sebesar 60% untuk pengeluaran dan 40% untuk perpajakan. Berbeda dengan Indonesia yang memberikan hampir 80% untuk stimulus pajak.

Hanya 11 Sektor?

Pemberian stimulus perpajakan dan kepastian kurang memberikan dampak pada dunia usaha dan tidak banyak menaikkan daya saing industri. Secara teoritis, stimulus berupa pengurangan pajak kurang memberikan *multiplier effect* dibanding belanja pemerintah. Pengurangan pajak sendiri ditujukan untuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh), kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea Masuk DTP, fasilitas PPh pasal 21 dan PPh Panas Bumi.

Penurunan itu terdiri atas penurunan PPh nonmigas sebesar Rp 17,3 triliun dan PPh migas sebesar Rp 18,0 triliun. Sementara itu, penerimaan PPN juga turun Rp 13,5 triliun, bea masuk turun Rp 2 triliun, dan bea keluar turun Rp 6,9 triliun.

Pengurangan pajak hanya akan efektif sepanjang banyak perusahaan di Indonesia masih bertahan hidup dan beroperasi. Faktanya, sudah lebih 460 perusahaan tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang menutup usahanya. Ini baru yang tercatat oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Apabila barisan 'taman makam perusahaan' ini makin panjang, tentu pengurangan pajak tidak akan efektif menumbuhkan sektor riil.

Bea masuk DTP hanya akan dirasakan manfaatnya apabila barang selundupan masih berkeliaran dan pengembangan industri nasional berbasis bahan baku lokal berjalan searah. Para pebisnis di industri elektronik dan TPT sudah lama mengeluh tidak mampu bersaing dengan barang-barang selundupan dari Tiongkok dan India. Sayangnya, industri hulu di kedua industri ini kurang berkembang, yang mengakibatkan tingginya kandungan impor komoditas elektronik dan TPT *made in* Indonesia.

Menurut penjelasan pemerintah, stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun bisa membantu men-"stabilisasi" perekonomian. Di atas kertas, argumennya, setidaknya bisa menyerap 2,4 juta tenaga kerja. Dari 2,4 juta itu, sekitar 110.000 tenaga kerja akan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK). Masalahnya, dana itu akan mengalir ke sektor dan daerah mana saja?

Stimulus fiskal itu didistribusikan ke Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 5,574 triliun, Departemen Perhubungan Rp 2,028 triliun, Departemen ESDM Rp 1,272 triliun. Distribusinya ke daerah mana saja sulit diketahui karena pola belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersifat sektoral.

Pemerintah menetapkan 11 sektor industri yang mendapat stimulus berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) senilai Rp 1,7 triliun. Pertanyaannya, mengapa hanya 11 sektor industri saja yang mendapat stimulus BM DTP? Padahal, dalam Kebijakan Pengembangan Industri Nasional sudah digariskan 32 industri prioritas dari 365 industri, yang sumbangannya terhadap total *output* 78% dan ekspor industri mencapai 83%. Konon, Departemen Perindustrian hanya akan mendapat Rp 13 miliar untuk restrukturisasi sentra TPT di Majalaya dan sepatu Cibaduyut. Tidak jelas bagaimana nasib sentra-sentra industri yang berorientasi ekspor dan penyerap tenaga kerja utama di Indonesia apakah akan mendapat stimulus langsung ataukah hanya BM DTP.

Akselerasi Pencairan

Dampak krisis keuangan akan mempengaruhi permintaan domestik, konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor.

Terguncangnya permintaan agregat ini pada akhirnya akan menentukan besaran PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2008, secara keseluruhan permintaan domestik masih cukup tinggi—walaupun sempat tertekan pada kuartal IV akibat krisis—, yaitu sebesar 7,7% per tahun. Sedangkan konsumsi masyarakat masih tumbuh sebesar 5,4%, konsumsi pemerintah sebesar 10,7%, investasi sebesar 12,6%, ekspor sebesar 13,7%, impor sebesar 13,6%, dan PDB sebesar 6,2%.

Dampak krisis global dipastikan terasa pada semester I-2009. Akibatnya, proyeksi laju pertumbuhan permintaan agregat ini pun turun. Penurunan tajam diperkirakan terutama terjadi pada investasi, ekspor, dan impor. Proyeksi untuk masing-masing variabel adalah 6,5% untuk investasi, 5,9% untuk ekspor, dan 6,1% untuk impor. Selain itu, penurunan pun terjadi pada permintaan domestik, yaitu sebesar 5,7%, konsumsi masyarakat sebesar 4,8%, konsumsi pemerintah sebesar 10,4%. Dengan konstelasi dan prediksi semacam ini, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan tumbuh sekitar 4,5-5,5%.

Yang pasti akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009. Stimulus fiskal diharapkan dapat menjadi "bahan bakar" agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap *on the right track*, setidaknya mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Pada 2009, diprediksi tingkat pengangguran terbuka akan mencapai 8,87% dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 107 juta orang. Dengan adanya stimulus fiskal, pengangguran terbuka diharapkan bisa ditekan menjadi 8,34%. Dengan kata lain, stimulus ini harus dapat menciptakan 150.000 lapangan kerja baru.

Agar efektif, stimulus fiskal realisasinya harus benar-benar "mulus". Caranya hanya dapat dilakukan dengan akselerasi pencairan paket stimulus, yakni disalurkan ke sektor dan daerah pada semester pertama, setidaknya dapat dimulai Maret ini.

Penyerapan anggaran pemerintah yang rendah hingga Juli akan menyebabkan "tidak mulusnya" dampak paket stimulus bagi perkembangan sektor riil dan dunia usaha Indonesia. Dengan stimulus fiskal dan kebijakan lainnya, semoga krisis keuangan global tidak menjadi krisis jilid kedua di Indonesia.